KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KU27DKJY

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

1/6							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 0 6 9			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5	H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 7 3 1 7 5 3 3 7 2 6 2 9 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : FISA DESIDUA WISMANDIRI							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01	457.000	457.000	0	5	22.850	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						ITIMUR	
C.3 ID Subunit (Organisasi :		тп п пп		ПП	<u> </u>	
C.4 Tanggal	:	1 6 dd 0 3 mm	2022уууу			_	
C.5 Nama Penai	Nama Penandatangan : HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan							
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	ı berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	